

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA



Nomor 14	Tahun 2012
----------	------------

PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA

NOMOR 14 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA NOMOR 06 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN BADAN PEMERINTAH DAERAH KOTA SAMARINDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai upaya peningkatan pelayanan penyuluhan keluarga berencana dan keluarga sejahtera yang menjangkau semua lapisan masyarakat yang mempunyai wilayah pada kecamatan;
 - b. bahwa dengan adanya pemekaran kecamatan menjadi 10 (sepuluh) kecamatan dengan Peraturan Daerah Jota Samarinda Nomor 02 Tahun 2010,

perlu penyesuaian Peraturan Walikota Nomor 06 Tahun 2009 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan Pemerintah Daerah Kota Samarinda yang telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 04 Tahun 2012 khususnya yaitu menambah 4 (empat) UPTB pada Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf **a** dan huruf **b**, perlu ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1957 tentang Penetapan Undang Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Dati II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1987 tentang Penetapan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda, Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan, Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai dan Kabupaten Daerah Tingkat Pasir (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 45; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3364);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 43);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010.
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.44-985 tahun 2005 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur;

13. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Samarinda Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 14 Seri E Nomor 04);
14. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2008 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA NOMOR 06 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS**

**DINAS DAN BADAN PEMERINTAH DAERAH
KOTA SAMARINDA.**

Pasal I

Ketentuan Lampiran II Pasal 2 ayat (2) Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Kota Samarinda dalam Peraturan Walikota Samarinda Nomor 06 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan Pemerintah Daerah Kota Samarinda (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2009 Nomor 06) diantara angka 6 dan angka 7 disisipkan 4 (empat) angka baru yakni angka 6a, 6b, 6c dan 6 d, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN (UPTB) KOTA
SAMARINDA**

NO	NAMA UPTD	DINAS INDUKNYA
1.	UPTB PLKB Samarinda Ilir	Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
2.	UPTB PLKB Samarinda Utara	Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
3.	UPTB PLKB Samarinda Ulu	Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
4.	UPTB PLKB Sungai Kunjang	Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
5.	UPTB PLKB Samarinda Seberang	Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
6.	UPTB PLKB Palaran	Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

6a.	UPTD PLKB Samarinda Kota	Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
6b.	UPTD PLKB Sambutan	Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
6c.	UPTD PLKB Sungai Pinang	Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
6d.	UPTD PLKB Loa Janan Ilir	Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
7.	UPTB Posko 1 Wilayah Samarinda Ilir dan Samarinda Utara	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8.	UPTB Posko 2 Wilayah Samarinda Ulu dan Sungai Kunjang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
9.	UPTB Posko 3 Wilayah Samarinda Seberang dan Palaran	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
10.	UPTB Analisis Kualitas Pangan Masyarakat	Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Daerah

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 21 Februari 2012

WALIKOTA SAMARINDA,

ttd

H. SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 21 Pebruari 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

H. ZULFAKAR NOOR

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2011 NOMOR 14

NO	N A M A	JABATAN	PARAF
1	RACHMANI	KASUB PUU	
2	H. ABDULLAH	KABAG HK	
3	H. DIWANSYAH	ASS I	